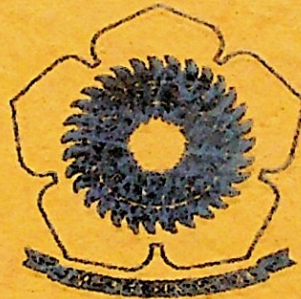


II  
NAN

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**SKRIPSI  
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI SUMATERA SELATAN**



**Diajukan Oleh :**

**NITA DARMA SARI  
01013120001**

**Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat  
Guna mencapai gelar  
Sarjana Ekonomi  
2005**

3507

5  
352.13507  
02  
2005

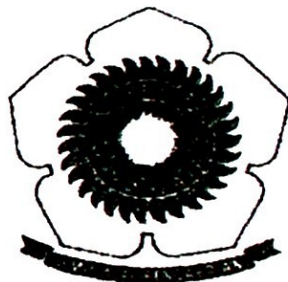
2. 12163

12445

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**



**SKRIPSI  
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI SUMATERA SELATAN**



**Diajukan Oleh :**

**NITA DARMA SARI  
01013120001**

**Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat  
Guna mencapai gelar  
Sarjana Ekonomi  
2005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

---

---

**Tanda Persetujuan Skripsi**

---

---

**Nama** : Nita Darma Sari  
**Nim** : 01013120001  
**Jurusan** : Ekonomi Pembangunan  
**Mata Kuliah** : Ekonomi Keuangan Daerah  
**Judul Skripsi** : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor Di Propinsi Sumatera Selatan

**Panitia Pembimbing Skripsi :**

**Tanggal** : Januari 2005.

**1. Ketua**



**Dr. Didik Susetyo, M.Si**

**Tanggal** : Januari 2005.

**2. Anggota**



**Drs Suhel, M.Si**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI SUMATERA SELATAN**

**Disusun oleh :  
NITA DARMA SARI  
01013120001**

**Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Komprehensif  
Pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2005  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

**Panitia Ujian Komprehensif  
Inderalaya, Februari 2005**

**Ketua**



**Dr. Didik Susetyo, M.Si  
1316173896**

**Anggota**



**Drs. Suhel, M.Si  
131993979**

**Anggota**



**Dr. Syamsurijal, AK  
130900942**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**



**Drs. Suhel, M.Si  
131993979**

*Sebaiknya jangan menyesali masa lampau karena itu tak akan pernah kembali. Lebih bijaksana bila Anda membenahi masa sekarang karena itulah milik Anda, Hadapi bayang-bayang hari esok tanpa rasa takut dan ragu (LONGFELLOW)*

*Orang yang masih bisa tersenyum ketika menghadapi kesulitan adalah orang yang berani*

*Kupersembahkan untuk :*

- ♥ Kedua Orang Tuaku Tercinta*
- ♥ Saudara-saudaraku*
- ♥ Sahabat-sahabatku*
- ♥ Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah S.W.T atas rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan”**.

Penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk lima bab, kajian difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan. Adapun variabel-variabel yang dibahas dalam skripsi ini adalah pendapatan perkapita, jumlah kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor dan inflasi. Tahapan penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab akan dijelaskan secara ringkas di bawah ini.

Bab 1 Pendahuluam berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yaitu gambaran mengenai latar belakang timbulnya suatu masalah, sehingga penulis berkeinginan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Bab II Tinjauan Pustaka, yaitu menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan atau berkaitan dengan variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Bab III Metode Penelitian berisi tentang ruang lingkup penelitian, sumber data, teknik analisis, dan definisi operasional variabel, yaitu cara yang digunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Bab IV Hasil dan Pembahasan

merupakan bab analisis dengan menggunakan program SPSS untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dalam hal ini adalah pendapatan perkapita, jumlah kendaraan, rata-rata tarif pajak kendaraan bermotor dan inflasi yang mempengaruhi variabel dependen yaitu penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan. Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan.

Akhirnya, sebagai manusia biasa yang banyak kelemahan, penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan terbuka penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Inderalaya, Januari 2005

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak kendala yang dihadapi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, penulisan ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih, khususnya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, yang mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dorongan sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara-saudaraku : Ayuk Yeyen dan Kak Robi, Yuk Novi dan Kak Yodi dan Adikku Andi yang telah memberiku semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Didik Susetyo, M.Si, selaku Ketua Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbingku..
4. Bapak Drs. Suhel, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan dan sekaligus sebagai anggota pembimbing skripsi yang membimbingku dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Hamid Halin, M.Si, selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Dra. Badia Parizade, M.B.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen serta Karyawan dan karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Staf Tata Usaha, karyawan dan Kayawati Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.



9. Seluruh Staf dan Karyawan Instansi Pemerintah yang sangat membantu dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, antara lain : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan khususnya bagian perpajakan, yaitu Bapak Rosidi Arsyad dan Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan.
10. Sahib-sahibku : Nopay, Didy, Nuke, Lia, Pooh, Anty, Ewik, aa Mat, aa Hadi dan reno terima kasih banyak untuk kebersamaan dan persahabatannya yang telah dilalui di bangku kuliah selama ini. Kalian semua adalah sahabat terbaikku.
11. Teman-temanku seangkatan di EP'01, yang telah memberikan keceriaan dalam perjalanan keseharianku di kampus.
12. Untuk Ais, Re, bang yus, Ical, Anton, Feby, Iit, Kak Ruly dan kak Indana yang telah banyak membantuku dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril dan materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Amin

## ABSTRACT

This research is aimed to describe some variables influence the Vehicle Tax Revenues. Analysis used in this research was Quantitative analysis and formulated in a Quadratic Regression Model. The output shows that variables influence vehicle tax revenues were per capita income, vehicles sums, vehicles tax tariff and inflation simultaneously significant to Vehicle Tax Revenues in coefficient correlation = 0,999 (99,9%). The output regression was positive and significant to vehicles sums and vehicles tax tariff, whereas per capita income and inflation were insignificant as statistic.

Keyword : vehicle sums, vehicle tax tariff, inflation.

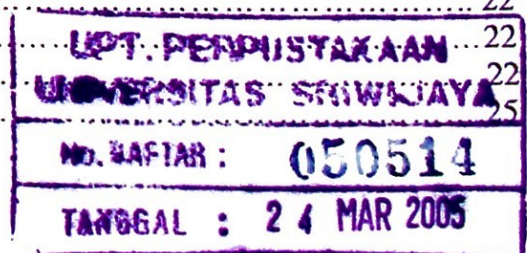
## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu dengan menggunakan regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan perkapita, jumlah kendaraan bermotor, rata-rata tarif per kendaraan dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan koefisien korelasi sebesar 99,9% yang berarti bahwa variabel bebas mempunyai hubungan yang sangat erat. Berdasarkan hasil perhitungan regresi, variabel yang berpengaruh positif dan signifikan secara statistik adalah jumlah kendaraan dan rata-rata tarif per kendaraan, sedangkan pendapatan perkapita dan inflasi tidak begitu berpengaruh dan tidak signifikan secara statistik.

**Kata Kunci :** jumlah kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor dan inflasi.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penulisan .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pembangunan Ekonomi Daerah .....	12
2.2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah .....	14
2.3 Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian .....	16
2.4 Pajak Sebagai Salah Satu Penerimaan Negara .....	17
2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak .....	18
2.6 Penelitian Terdahulu .....	20
2.7 Hipotesis .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	22
3.2 Sumber Data .....	22
3.3 Teknik Analisis .....	22
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	25



## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran Umum Propinsi Sumatera Selatan	
4.1.1	Keadaan geografis .....	27
4.1.2	Struktur Perekonomian .....	28
4.1.3	Pertumbuhan Ekonomi .....	32
4.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja .....	34
4.2	Diskripsi Variabel Penelitian	
4.2.1	Pendapatan Per Kapita Penduduk Sumatera selatan .....	36
4.2.2	Jumlah Kendaraan bermotor .....	38
4.2.3	Proksi Rata-rata Tarif Per Kendaraan .....	40
4.2.4	Laju Inflasi .....	42
4.2.5	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	43
4.3	Hasil dan Pembahasan	
4.3.1	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Total Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	48
4.3.2	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan .....	50
4.3.3	Prospek Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	61

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Kesimpulan .....	62
5.2	Saran .....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan	6
Tabel 1.2 Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Propinsi Sumatera Selatan	8
Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan	29
Tabel 4.2 Peranan Masing-masing Sektor Dalam Pembentukan PDRB	30
Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha	33
Tabel 4.4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan	35
Tabel 4.5 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Sumatera Selatan Menurut Harga Konstan Dengan Migas	38
Tabel 4.6 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan	40
Tabel 4.7 Perhitungan Tarif Pajak Kendaraan Sepeda Motor	41
Tabel 4.8 Perkembangan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan	42
Tabel 4.9 Perkembangan Laju Inflasi di Kota Palembang	43
Tabel 4.10 Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan	47
Tabel 4.11 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Total Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	49

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Hasil perhitungan Program SPSS antara variabel Pajak Kendaraan Bermotor dengan variabel Pendapatan Per Kapita, Jumlah Kendaraan Bermotor, Rata-rata Tarif Pajak Per Kendaraan dan Inflasi.
- Lampiran 2. Hasil perhitungan uji kriteria ekonometrika, yaitu uji gejala multikolinieritas, uji gejala autokorelasi dan uji gejala heterokedasitas.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan propinsi dan pemerintah kabupaten/kota seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tidak dikenal lagi pembagian daerah sebagai tingkat I dan daerah tingkat II. Pemerintah daerah hanya dibedakan menjadi daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota, tidak ada lagi daerah kotamadya. Seperti halnya dengan pemerintah pusat menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, di samping sumber-sumber pendapatan lainnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Berkaitan dengan kegiatan pembangunan daerah, pengadaan pendanaan pembangunan merupakan sasaran utama pembangunan jangka panjang salah satu agenda Pemerintah Daerah yang mendesak namun sering menjadi masalah. Adapun kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada ketersediaan potensi ekonomi dan pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi



yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Salah satu penerimaan daerah berasal dari pajak daerah, jenis pajak Kabupaten/kota berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2000 terdiri dari : a) pajak hotel, b) pajak restoran, c) pajak hiburan, d) pajak reklame, e) pajak penerangan jalan, f) pajak pengambilan bahan galian golongan C, g) pajak parkir. Selain jenis pajak yang sudah ditentukan di atas, pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pajak lainnya berdasarkan Peraturan Daerah. Pajak Propinsi meliputi : a) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, b) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Sejalan dengan UU nomor 25 tahun 1999 tersebut, Lains, 1985 menyatakan bahwa untuk dapat memiliki keuangan yang memadai, daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya dengan beberapa cara, di antaranya sebagai berikut : (1) dapat mengumpulkan dari pajak daerah yang telah disetujui pemerintah pusat, (2) melakukan pinjaman, (3) ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak negara yang dipungut di daerah, (4) menambah tarif pajak negara tersebut, (5) menerima bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat (Taufik, Abukosim, 2004 : 1).

Kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah tersebut tidak dapat diartikan bahwa tiap tingkat pemerintahan di daerah harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari sumber penerimaan asli daerah. Walaupun demikian

kemandirian daerah di dalam membiayai kebutuhan anggarannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan usaha yang perlu dicapai. Apalagi di era reformasi ini, salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan adalah penyebaran tanggung jawab ke daerah-daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan pengembangan otonomi daerah yang makin nyata dan bertanggung jawab. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut dimaksudkan pula untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada semua anggota masyarakat dari pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang terus berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Kegiatan pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat digali dari potensi daerah itu sendiri atau dapat pula berasal dari luar daerah. Untuk itu peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah harus terus ditingkatkan dan disempurnakan.

Perkembangan pembangunan daerah tercermin dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan wilayah itu sendiri (otonomi), yang memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Oleh karena kemampuan daerah masih dalam batas-batas mengelola, memanfaatkan sumber daya ekonomi, maka kebijakan pemerintahan daerah cenderung berorientasi pada kebijakan pusat.

Sekalipun demikian, peranan pemerintah daerah untuk dapat membiayai sendiri setiap pengeluarannya baik belanja rutin maupun belanja pembangunan, harus tetap ditingkatkan. Hal ini berarti pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengenakan pungutan atas masyarakat selain menerima bantuan dari pemerintah pusat berupa dana pembangunan daerah sebagai penerimaan pelengkap. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki kecakapan dalam mengelola keuangan, baik itu dari sudut penerimaan maupun pengeluarannya.

Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah antara lain untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja. Guna mewujudkan tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama harus memiliki inisiatif dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat berdasarkan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat merancang dan membangun perekonomian daerah. Potensi sumber daya yang dimiliki dapat dikembangkan, sehingga dapat digunakan membiayai kegiatan pembangunan daerah pada sektor-sektor yang produktif. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan yang sampai saat ini mempunyai peranan yang cukup penting. Untuk menggali sumber dana tersebut diperlukan suatu perencanaan yang matang guna menghindari kekliruan dalam melakukan prediksi pendapatan dimasa yang akan datang, sehingga tidak realitisnya anggaran pendapatan dan “mis statement” anggaran pendapatan yang menyebabkan “mis leading” pembelanjaan dapat dihindari (Bamim, 2002 : 108).

Salah satu ciri kemampuan suatu daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah ditentukan oleh kemampuan dibidang keuangan daerah. Melalui kewenangan tersebut daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan jalan menggali sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Penerimaan daerah dari bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Selatan terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Realisasi penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Selatan sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap**  
**Anggaran Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun 1994/1995 – 2003**  
**(jutaan rupiah)**

No	Tahun	APBD	PAD	Persentase
1	1994/1995	190.937,4	54.411,6	28,50
2	1995/1996	225.209,0	71.889,3	31,92
3	1996/1997	132.772,9	83.380,1	62,8
4	1997/1998	265.518,4	90.815,4	34,2
5	1998/1999	295.177,7	55.256,0	18,7
6	1999/2000	487.606,1	78.387,1	16,1
7	2000	561.427,8	119.909,2	21,4
8	2001	674.442,6	219.257,2	32,5
9	2002	806.178,3	376.476,1	46,7
10	2003	1.042.002,0	428.080,4	41,1

Sumber : Biro Keuangan Propinsi Sumatera Selatan, 2003

Berdasarkan Tabel 1.1 kontribusi PAD terhadap APBD dari Tahun Anggaran 1994/1995 – 2003 relatif berfluktuatif. Kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 1996/1997 cenderung meningkat, hanya pada tahun 1998/1999 dan tahun 1999/2000 menurun hingga kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah dibawah 20 persen. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia sehingga berdampak pula pada pendapatan daerah termasuk Propinsi Sumatera Selatan. Namun di tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah meningkat cukup tinggi, bahkan di tahun 2002 kontribusinya sebesar 46,7 persen.

Adapun komponen-komponen Pendapatan Daerah dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dalam mengelola keuangan daerah, salah satu unsur yang cukup menentukan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk mengelola dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, karena kemampuan dan kemandirian suatu daerah ditentukan oleh berapa besar pendapatan asli daerah tersebut dapat digali dan direalisasikan sesuai dengan potensi daerah yang tersedia.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang termasuk sebagai sumber pendapatan asli daerah dipungut oleh pemerintah daerah dalam usaha membiayai pembangunan daerah yang dilaksanakan.

Sistem dan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Propinsi Sumatera Selatan pada mulanya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menunjuk wakilnya di daerah dan dilakukan secara terpisah. Pada saat ini pelaksanaan pemungutan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Sumatera Selatan, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Komdak Sumatera Selatan dan Kepala Perum Asuransi Jasa Raharja Cabang Palembang dengan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap (SAMSAT).

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1994/1995 – 2003**  
**Dalam ribuan**

Tahun	Pajak Kendaraan bermotor		(%)
	Target	Realisasi	
1994/1995	12.000.000.000	16.141.186.540	134,51
1995/1996	17.800.000.000	20.245.409.473	113,74
1996/1997	23.000.000.000	23.683.007.830	102,97
1997/1998	26.000.000.000	24.870.046.995	96,65
1998/1999	31.000.000.000	31.665.473.044	102,15
1999/2000	37.400.000.000	43.122.659.019	115,30
2000	43.265.000.000	47.064.576.282	108,78
2001	66.800.000.000	77.486.625.144	116,00
2002	68.000.000.000	87.027.784.826	127,98
2003	78.000.000.000	115.945.271.067	148,65

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

(%) : Prosentase realisasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

Dari Tabel 1.2 di atas menunjukkan perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang cukup baik. Target yang dicapai dalam setiap tahun anggaran selalu terlampaui atau pada setiap tahunnya mengalami kenaikan, hanya pada tahun anggaran 1997/1998 target tidak terlampaui atau realisasinya lebih kecil dari target yang ingin dicapai, hal ini karena adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997.

Pada tahun anggaran 1994/1995 target pajak kendaraan bermotor yang ingin dicapai sebesar 12.000.000.000 rupiah dan terus meningkat hingga pada tahun 2003 menjadi 78.000.000.000 rupiah, hal ini mengembirakan untuk keuangan daerah. Untuk realisasi dari pajak kendaraan bermotor juga mengalami kenaikan pada setiap tahun anggaran. Pada tahun anggaran 1994/1995 yang hanya sebesar 16.141.186.540 rupiah menjadi sebesar 115.945.271.067 rupiah pada tahun 2003.

Berdasarkan data empiris pada Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa penerimaan yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam sepuluh tahun terakhir cukup tinggi. Dari tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 2003 pajak kendaraan bermotor selalu mencapai target yang diinginkan. Hasil dari pengumpulan pajak kendaraan bermotor akan lebih baik lagi apabila setiap wajib pajak mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan dari pajak, maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk membantu serta berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, karena kegiatan tersebut ditujukan untuk kepentingan



masyarakat. Bantuan dan partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Secara umum untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah dapat dicapai dengan jalan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat terutama yang berkaitan dengan objek-objek pajak dan retribusi. Peningkatan tingkat kegiatan ekonomi akan menaikkan tingkat investasi yang pada akhirnya produktifitas daerah bertambah, dengan begitu Produk Domestik Regional Bruto akan lebih cepat terangkat. Seluruh hasil produksi atau output yang diciptakan oleh suatu daerah tercatat di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), artinya PDRB secara tidak langsung bisa digunakan sebagai indikator dalam menilai hasil kegiatan pembangunan ekonomi daerah.

Pertumbuhan sektor ekonomi di Propinsi Sumatera Selatan akan meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di segala pelosok wilayah selain pemanfaatan bantuan dari pusat dan investasi pihak swasta. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan saat sekarang lebih banyak dimanfaatkan untuk pengeluaran rutin daerah meskipun porsinya masih relatif kecil, sedangkan pengeluaran pembangunan lebih tergantung pada pemerintah pusat.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut; **“faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera Selatan .”**

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka secara umum penulisan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaruh pendapatan perkapita, jumlah kendaraan bermotor, tarif kendaraan bermotor dan inflasi terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh manfaat, seperti :

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan penulis melalui perbandingan antara pengetahuan yang diperoleh penulis selama di bangku kuliah dengan realita yang ada di masyarakat.
2. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi untuk keadaan yang memenuhi kriteria yang sama dan memberikan pemikiran baru bagi penulis lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsad, Mawardi, 2003. "Analisis Ketimpangan Ekonomi Regional di Sumatera Selatan", *Tesis Program Pasca Sarjana universitas Sriwijaya*, Palembang
- Arsyad, Lincoln, 1999, "Ekonomi Pembangunan", *STIE YKPN*, Yogyakarta
- Arsyad, Lincoln, 1999, "Pengantar perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah", *BPFE*, Yogyakarta
- Bamim, Selamat, 2002. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Sumatera Selatan", *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya*, Palembang
- Darwin, John, 2002. "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat-Daerah Kasus Propinsi Sumatera Selatan", *Tesis Pascasarjana Universitas Sriwijaya*, Palembang
- Dipenda Propinsi Sumatera Selatan, 2003, "Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan", *DIPENDA Propinsi Sumatera Selatan*
- Eryus, Ak, 1999. "Dampak Aktivitas Kendaraan Bermotor Terhadap Lingkungan", *Dalam Jurnal Manajemen Transportasi, Sekolah Tinggi Manajemen Taranspor Trisakti, Vol 01*. Jakarta Timur
- Gujarati, Damodar, "Ekonometrika Dasar", *Erlangga*, Jakarta
- Gunadi, Indra, 2002. "Pengaruh Jumlah Kendaraan dan Tarif Pajak Kendaraan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Sumatera Selatan", *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*, Palembang
- Ismail, Zainuddin, 2003. "Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan asli daerah Propinsi Sumatera Selatan", *Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan*, Sumatera Selatan
- Jhingan, M.L. 2000. "Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan", *PT. Raja Grafindo Persada*, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. "Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi", *Erlangga, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, Yogyakarta

- Mangkue Subroto, Guritno, 1993. "Ekonomi Publik", *BPFE, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*
- Mardiasmo, 2000. "Perpajakan", *Andi Yogyakarta, Yogyakarta*
- Musgrave, Richard, 1991. "Keuangan Negara Dalam teori dan Praktek", *Erlangga, Jakarta*
- Sukirno, Sadono, 2000. "Pengantar Teori Mikro Ekonomi", *PT. Raja. Grafindo Persada, Jakarta*
- Sukirno, Sadono, 2000. "Pengantar Teori Makro Ekonomi", *PT. Raja. Grafindo Persada, Jakarta*
- Suparmoko, Irawan, 1990. "Ekonomika Pembangunan", *BPFE, Yogyakarta*
- Suparmoko M, 1992. "Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek", *BPFE, Yogyakarta*
- Suparmoko M, 2001. "Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah", *BPFE, Yogyakarta*
- Susetyo, Didik, 2004. "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah", *Materi Orasi Ilmiah, STIE , Palembang*
- Susetyo, Didik, 2003. "Fiscal Need and Fiscal Capacity In Autonomy Era", *Journal Of The Faculty Of Economics, Vol.XVIII, No.2, Bulan September*
- Susetyo, Didik, 1998. "Analisis kapasitas Pajak (*Tax Capacity*) dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Daerah Tingkat II di Sumatera Selatan", *Jurnal Ekonomi Sriwijaya No.2*
- Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2000. "Perpajakan Indonesia", *Salemba Empat. Jakarta*
- Taufiq, Abukosim, 2004. "Respon Pajak Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang", *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume II, No.1*
- Zahari, Ms, 2001. "Analisis Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Jambi", *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang*